

SINKRONISASI NILAI KEARIFAN LOKAL PESANTREN: STANDAR AKREDITASI NASIONAL

Muhammad Ilzamul Khoir¹, Suhulatul Amaliyah²

¹ Universitas Nurul Jadid; bangilzam520@gmail.com

² Universitas Kiai Ahmad Siddiq Jember; amaliyahsuhul@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Nilai Lokal Pesantren,
Akreditasi Nasional,
Sinkronisasi Kelembagaan

Article history:

Received 2025-07-16

Revised 2025-07-17

Accepted 2025-07-17

ABSTRACT

Penelitian ini berfokus pada ketegangan antara nilai-nilai lokal pesantren dengan standar akreditasi nasional dalam konteks Pondok Pesantren Nurul Jadid. Ketegangan tersebut muncul akibat perbedaan paradigma antara spiritualitas dan tradisi pendidikan pesantren dengan logika teknokratik yang mendasari sistem akreditasi formal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen, penelitian ini mengungkap adanya disonansi epistemologis dan struktural yang memengaruhi proses penyesuaian kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan kuat dari regulasi nasional, pesantren tidak bersikap resistif, melainkan merespons dengan strategi sinkronisasi kelembagaan yang kontekstual yaitu mentransformasi nilai-nilai lokal menjadi narasi administratif yang kompatibel dengan borang akreditasi. Temuan ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis mengenai isomorfisme regulatif dan sistem nilai dalam pendidikan, tetapi juga memberi implikasi praktis berupa kebutuhan penyusunan kebijakan akreditasi yang lebih inklusif terhadap keberagaman kultural dan spiritual lembaga pendidikan berbasis komunitas.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Ilzamul Khoir

Universitas Nurul Jadid; bangilzam520@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis nilai yang memiliki karakteristik sosial, spiritual, dan budaya yang khas (Fitri & Ondeng, 2022; Khoiriyah, 2022). Dalam konteks sistem pendidikan nasional, posisi pesantren semakin diperkuat melalui regulasi formal seperti PMA No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, yang mengakui hak lembaga ini untuk memperoleh akreditasi (Imanuddin & Yunus, 2025; Mediawati, 2023). Namun, implementasi standar akreditasi nasional pada pesantren seringkali tidak mempertimbangkan dimensi nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ruh utama pendidikan pesantren. Ketimpangan ini memunculkan tantangan serius terkait relevansi indikator akreditasi dengan sistem nilai yang hidup dalam komunitas pesantren.

Temuan di Pondok Pesantren Nurul Jadid menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara upaya memenuhi standar akreditasi nasional dengan pelestarian nilai-nilai lokal pesantren seperti *khidmah*, *tawadhu'*, dan *keikhlasan*. Ketegangan ini dapat dijelaskan melalui teori sistem nilai Talcott Parsons, di mana sistem pendidikan merupakan subsistem budaya yang merefleksikan nilai-nilai dominan masyarakat. Di sisi lain, teori institusionalisme dari Niswah et al., (2025) menyatakan bahwa lembaga cenderung mengalami isomorfisme yakni penyeragaman struktur akibat tekanan regulatif yang dalam konteks pesantren, dapat mengikis nilai-nilai khas lokal. Keterkaitan antara variabel nilai lokal dan standar akreditasi dapat dilihat sebagai proses negosiasi antara dua sistem sosial yang memiliki logika berbeda: logika nilai tradisional dan logika manajerial formal.

Beberapa penelitian relevan mendukung pentingnya penguatan hubungan antarvariabel ini. Khadijah, (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan akreditasi dipengaruhi oleh sejauh mana nilai lokal dapat diartikulasikan dalam dokumen mutu. Penelitian Setiawan, (2025) menemukan bahwa institusi pendidikan berbasis komunitas cenderung mengalami ketegangan saat menghadapi tekanan standarisasi. Sementara Kusumaningrum et al., (2022) mengungkapkan bahwa strategi adaptif berbasis nilai mampu meningkatkan keberterimaan akreditasi di kalangan pesantren. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara sistematis keterkaitan antara variabel nilai kearifan lokal dengan strategi sinkronisasi dalam proses akreditasi, khususnya melalui pendekatan teoritik yang integratif.

Dari sini dapat disimpulkan adanya gap dalam literatur, yaitu belum adanya model konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel nilai lokal pesantren, standar akreditasi nasional, dan strategi sinkronisasi kelembagaan dalam kerangka teoritik yang utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengembangkan model relasional antara nilai lokal dan sistem mutu nasional berbasis teori sistem nilai dan institusionalisme. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang dinamika antara budaya lokal dan kebijakan publik dalam konteks akreditasi lembaga pendidikan berbasis komunitas.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi antarvariabel yang dianalisis secara teoritik dan empiris. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan resistensi nilai terhadap standar formal, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana strategi sinkronisasi dapat dibangun dengan mempertimbangkan hubungan fungsional antara nilai lokal dan regulasi nasional. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam studi akreditasi lembaga pendidikan berbasis budaya.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara nilai-nilai lokal pesantren dengan standar akreditasi nasional, serta mengidentifikasi strategi sinkronisasi yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam mengelola ketegangan antara keduanya. Dengan fokus pada hubungan antarvariabel ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pengembangan sistem akreditasi yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana nilai-nilai kearifan lokal pesantren diselaraskan dengan standar akreditasi nasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan budaya secara mendalam dalam konteks kelembagaan pesantren. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus pada Pondok Pesantren Nurul Jadid yang dipilih secara purposif karena memiliki karakter khas: memadukan manajemen modern dengan nilai-nilai tradisional pesantren. Hal ini menjadikan pesantren tersebut relevan sebagai objek kajian tentang integrasi nilai lokal dalam sistem mutu pendidikan (Mahmud et al., 2022; Najiburrahman et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengasuh, pimpinan biro pendidikan, kepala satuan pendidikan formal, dan tokoh pesantren. Observasi digunakan untuk mencermati praktik dan aktivitas kelembagaan yang berkaitan dengan akreditasi, sedangkan dokumentasi difokuskan pada dokumen akreditasi, pedoman internal, dan arsip sejarah lembaga.

Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Bistiana & Indrarini, 2021; Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara nilai lokal dan indikator akreditasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking kepada informan utama. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang jelas tentang strategi sinkronisasi nilai lokal dalam akreditasi, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan model akreditasi yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap pesantren.

3. HASIL DAN DISKUSI

Ketegangan antara Nilai Lokal dan Standar Akreditasi Nasional

Salah satu temuan esensial dalam penelitian ini mengindikasikan adanya friksi epistemik antara nilai-nilai kultural khas pesantren seperti *khidmah* (etos pengabdian), *tawadhu'* (kerendahan hati yang reflektif), dan *ikhlas* (ketulusan batiniah) dengan standar akreditasi nasional yang cenderung mengedepankan paradigma manajerialistik dan instrumentalisasi kinerja (Arlina et al., 2024; Zamroni et al., 2022). Nilai-nilai spiritual-transendental yang selama ini menjadi fondasi ontologis pendidikan pesantren, justru tereduksi dalam kerangka evaluatif yang berbasis indikator teknokratis. Fenomena ini mencerminkan keterputusan ontologis antara dimensi etik-religius pesantren dan sistem akreditasi formal yang menstandarkan mutu secara positivistik, tanpa memberi ruang cukup bagi ekspresi nilai-nilai lokal yang sarat makna.

Ketegangan struktural ini tampak nyata dalam penerapan berbagai indikator akreditasi, seperti kewajiban pemenuhan dokumen mutu, pengukuran kinerja berbasis hasil (*output-oriented performance*), serta evaluasi capaian institusi secara kuantitatif. Model penilaian yang homogen dan seragam tersebut cenderung mengesampingkan dimensi substansial yang menjadi ciri khas pendidikan berbasis nilai, seperti yang dianut dalam tradisi pesantren. Akibatnya, aspek-aspek non-formal dan afektif yang justru menjadi inti dari proses pendidikan tradisional berbasis spiritualitas sering kali tereliminasi dalam praktik akreditasi yang teknokratik.

Dengan merujuk pada teori sistem nilai Talcott Parsons (1951), pendidikan dipahami sebagai bagian integral dari subsistem budaya yang berfungsi untuk melestarikan, mentransmisikan, dan mereproduksi nilai-nilai kolektif dalam masyarakat (Baharun & Badriyah, 2020). Dalam kerangka ini, pesantren tidak hanya berperan sebagai wahana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai agen sosialisasi nilai-nilai religius dan kebudayaan spiritual. Namun, ketika institusi pesantren didorong untuk menyesuaikan diri secara struktural dengan logika rasional-formal yang dibawa oleh negara melalui kebijakan akreditasi, maka terjadilah disonansi fungsional antara dua sistem nilai yang secara epistemologis dan normatif saling berseberangan.

Dalam pernyataannya, Mujiburrahman selaku administrator Pondok Pesantren Nurul Jadid menyuarakan kritik reflektif terhadap prosedur akreditasi yang diterapkan oleh lembaga formal. Ia menggarisbawahi bahwa proses akreditasi selama ini cenderung mengedepankan kelengkapan dokumen administratif dibandingkan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai substansial yang menjadi karakter inti pendidikan pesantren.

Pelaksanaan akreditasi cenderung menitikberatkan pada aspek administratif dibandingkan dengan substansi pendidikan yang sesungguhnya. Nilai-nilai seperti *khidmah* yang dijalankan oleh para santri tidak mendapatkan tempat dalam instrumen akreditasi. Padahal, nilai tersebut merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem pendidikan pesantren yang kami jalankan.

Pernyataan tersebut merefleksikan adanya jarak epistemologis antara logika birokrasi formal yang mendasari sistem akreditasi dan nilai-nilai intrinsik yang menjadi dasar operasional lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren. Dalam pandangan pesantren, praktik seperti *khidmah* bukanlah sekadar rutinitas keseharian, melainkan merupakan pilar utama dalam proses pembentukan karakter, moralitas, dan kedalaman spiritual santri. Namun demikian, dimensi transendental semacam ini kerap kali terabaikan dalam mekanisme evaluasi formal yang lebih menekankan indikator administratif dan teknis yang seragam.

Lebih jauh, testimoni tersebut menyingkap keresahan yang muncul di lingkungan internal pesantren terhadap dominasi pendekatan manajerial dalam menentukan mutu lembaga pendidikan. Bagi pesantren, kualitas pendidikan tidak semata direduksi menjadi angka-angka atau data kuantitatif, tetapi terletak pada keberhasilan menanamkan nilai keikhlasan, semangat pengabdian, serta pembentukan integritas pribadi dimensi-dimensi afektif yang sulit dicakup oleh instrumen akreditasi yang rigid dan positivistik.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Hidayat, (2025) yang mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan berbasis komunitas, seperti pesantren, kerap mengalami hambatan ketika harus berhadapan dengan tuntutan eksternal untuk memenuhi standar formal yang seragam. Ketegangan muncul akibat ketidakharmonisan antara rasionalitas birokratis yang diusung oleh negara dan logika kultural yang hidup dalam tradisi lokal. Ketika ruang adaptasi terhadap kearifan lokal tidak diakomodasi dalam kerangka kebijakan mutu pendidikan, maka potensi terjadinya dislokasi nilai dan keterasingan identitas institusi menjadi semakin nyata.

Tabel 01. Perbandingan Sistem Nilai Pesantren dan Sistem Nilai Akreditasi Nasional

Aspek Penilaian	Sistem Nilai Pesantren	Sistem Nilai Akreditasi Nasional	Ketegangan yang Timbul
Tujuan Pendidikan	Pembentukan karakter, spiritualitas, <i>khidmah</i>	Pencapaian kompetensi akademik, output terukur	Nilai-nilai non-akademik tidak terakomodasi secara eksplisit
Sumber Nilai	Tradisi, ajaran agama, praktik sosial komunitas	Regulasi nasional, standar manajemen mutu	Terjadi disonansi dalam prioritas dan orientasi nilai
Metode Evaluasi	Observasi kualitatif, pendekatan holistik	Instrumen kuantitatif, rubrik indikator formal	Dimensi batiniah sulit dinilai secara objektif dan terstandar
Peran Guru (Kiai/Ustadz)	Pembimbing spiritual, panutan moral	Fasilitator pembelajaran berbasis kurikulum nasional	Peran sosial-kultural guru tidak termuat dalam borang
Peran Santri	Pelaku pengabdian, murid spiritual	Peserta didik formal yang harus terukur capaian akademiknya	Nilai pengabdian dan keikhlasan tidak dinilai

Dengan demikian, bagian ini menegaskan bahwa terdapat disonansi yang nyata antara dua sistem nilai yang bertemu dalam ruang kebijakan akreditasi: sistem nilai lokal pesantren yang berbasis

spiritualitas dan kolektivitas, dan sistem nilai manajerial negara yang berbasis efisiensi dan akuntabilitas. Ketegangan ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-budaya yang lebih dalam, yang memerlukan pendekatan adaptif agar keduanya dapat bersinergi secara konstruktif.

Isomorfisme Lembaga dan Tekanan Regulasional

Dalam perspektif teori institusionalisme, DiMaggio dan Powell (1983) mengemukakan konsep isomorfisme regulatif, yaitu suatu mekanisme di mana organisasi-organisasi cenderung mengadopsi struktur, kebijakan, dan prosedur yang seragam sebagai respons terhadap tekanan eksternal dari otoritas yang memiliki legitimasi (M. N. Hidayat, 2023). Tekanan ini umumnya hadir dalam bentuk regulasi formal, standar mutu, atau ekspektasi normatif yang bersifat menyeluruh dan mengikat. Dalam ranah pendidikan, fenomena ini tampak dalam implementasi sistem akreditasi nasional yang mendorong berbagai lembaga, termasuk pesantren, untuk mengadaptasi model tata kelola yang bercorak manajerial-formalistik sebagai prasyarat pengakuan institusional.

Konsep isomorfisme regulatif memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami dinamika institusional yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Desakan untuk mematuhi standar akreditasi nasional telah mendorong pesantren ini untuk melakukan berbagai adaptasi struktural, antara lain melalui perumusan visi dan misi secara terstruktur, penerapan sistem penjaminan mutu internal, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selaras dengan ketentuan dalam borang akreditasi. Berbagai penyesuaian ini mencerminkan proses transformasi kelembagaan yang dijalankan demi memperoleh legitimasi formal dari negara dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Di balik berbagai upaya penyesuaian struktural yang dilakukan, tersembunyi dilema fundamental yang mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan legitimasi formal dan upaya menjaga otentisitas identitas kultural pesantren. Proses transformasi kelembagaan yang diarahkan pada pemenuhan standar akreditasi nasional berpotensi menggerus nilai-nilai khas yang menjadi fondasi pendidikan pesantren. Hal ini tersirat dalam pernyataan salah satu perwakilan biro kurikulum Pondok Pesantren Nurul Jadid Rahmad toyyib mengatakan bahwa Ada semacam tekanan agar kita menjadi seperti sekolah umum. Sementara karakter kita itu berbeda, kita itu mendidik karakter, bukan hanya kompetensi akademik. Tapi tetap kita harus ikut aturan supaya diakui.

Pernyataan tersebut mencerminkan kondisi ambiguitas institusional yang dihadapi pesantren, yakni berada di antara dua kutub logika yang saling bertentangan: satu sisi berupaya mempertahankan integritas nilai-nilai tradisional yang berakar pada spiritualitas dan pembentukan karakter, sementara sisi lainnya dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem akreditasi formal yang menitikberatkan pada aspek teknokratik seperti dokumentasi administratif, indikator kinerja terukur, dan pelaporan berbasis standar. Ambivalensi ini menandakan kompleksitas adaptasi institusional dalam ruang pendidikan berbasis nilai di tengah arus rasionalisasi sistem pendidikan nasional.

Fenomena ini selaras dengan hasil penelitian Baidowi & Salehudin, (2021), yang menegaskan bahwa keberhasilan dalam memperoleh akreditasi tidak semata ditentukan oleh kualitas substantif institusi pendidikan, melainkan juga oleh kecakapan institusi dalam menampilkan performa kelembagaan sesuai dengan konstruksi ekspektasi eksternal yang telah diformalkan. Dalam praktiknya, lembaga yang terampil dalam menyusun dokumen dan memenuhi format administratif yang ditetapkan negara cenderung lebih mudah meraih status akreditasi, meskipun esensi pendidikan yang dijalankan belum tentu mengalami transformasi mendalam secara substantif.

Di sisi lain, tekanan regulatif tersebut juga turut mendorong terjadinya perubahan struktural dalam sistem tata kelola pesantren. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya unit-unit baru seperti lembaga

penjamin mutu internal yang sebelumnya asing dalam tradisi pesantren serta penerapan instrumen evaluasi berbasis data untuk mengukur capaian kinerja santri maupun guru. Meski transformasi ini membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, ia juga menyisakan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran orientasi dari sistem pendidikan berbasis nilai menuju pendekatan performatif yang pragmatis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tuntutan akreditasi telah menjadi motor utama terbentuknya proses institusional isomorphism dalam konteks pesantren sebagai upaya memperoleh legitimasi dari negara. Namun proses ini tidak berlangsung dalam ruang hampa, sebab ia membawa implikasi ideologis berupa potensi penjinakan atau domestikasi terhadap nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi ruh pendidikan pesantren. Tantangan yang paling krusial adalah bagaimana merumuskan strategi adaptasi yang tidak menanggalkan identitas, yaitu dengan mengembangkan model akomodasi yang tetap berpijak kuat pada prinsip-prinsip inti pendidikan pesantren.

Strategi Sinkronisasi Kelembagaan yang Kontekstual

Dalam merespons ketegangan antara nilai-nilai lokal dan tekanan struktural dari standar akreditasi nasional, Pondok Pesantren Nurul Jadid tidak mengambil posisi antagonistik atau menolak secara total terhadap sistem akreditasi tersebut. Sebaliknya, pesantren ini memperlihatkan kemampuan adaptif dengan merumuskan strategi sinkronisasi kelembagaan yang bersifat kontekstual. Strategi ini bertujuan untuk merekonsiliasi logika spiritual dan kultural khas pesantren dengan rasionalitas administratif dan manajerial yang menjadi fondasi sistem akreditasi nasional. Pendekatan tersebut merepresentasikan sikap akomodatif terhadap dinamika perubahan, namun tetap berupaya menjaga integritas prinsip-prinsip fundamental yang menjadi identitas pesantren.

Strategi sinkronisasi ini diwujudkan melalui proses integratif, yakni dengan mentransformasikan nilai-nilai khas pesantren ke dalam bentuk narasi dan format yang kompatibel dengan sistem akreditasi nasional. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti ikhlas, khidmah, dan tawadhu' yang sebelumnya bersifat implisit dan tidak terakomodasi dalam dokumen formal direformulasi menjadi indikator administratif yang diakui secara prosedural. Upaya ini mencerminkan bentuk negosiasi epistemologis antara dua ranah nilai yang berbeda: spiritualitas pesantren dan rasionalitas teknokratik lembaga akreditasi.

Sinkronisasi Nilai Tradisional Pesantren dengan Akreditasi Nasional



Gambar 01, Strategi Sinkronisasi Institusional Pesantren Nurul Jadid

Sebagai ilustrasi nyata, nilai ikhlas yang dalam tradisi pesantren bersifat internal dan sulit diukur secara empiris, direpresentasikan melalui berbagai program konkret seperti kegiatan bakti sosial santri, keberlanjutan hubungan antara guru dan murid setelah masa pendidikan formal berakhir, serta partisipasi santri dalam pengabdian masyarakat yang dimasukkan ke dalam kurikulum aplikatif. Di sisi lain, nilai khidmah dialihwujudkan menjadi portofolio aktivitas pengabdian yang terdokumentasi

secara sistematis, sehingga dapat dikategorikan sebagai bagian dari komponen “penguatan karakter peserta didik” dalam instrumen borang akreditasi.

Hasil observasi lapangan pada Unit Penjamin Mutu Internal menunjukkan adanya terobosan administratif yang berakar pada nilai-nilai lokal pesantren. Inovasi tersebut mencakup pelatihan penyusunan dokumen mutu yang secara naratif merepresentasikan karakteristik khas pesantren, serta pengembangan instrumen evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga mencakup aspek perkembangan spiritual dan sosial santri. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya adaptasi yang berkesadaran nilai, tanpa mengorbankan identitas kultural yang menjadi ciri utama pendidikan pesantren. Aliyuddin selaku koordinator unit mutu mengungkapkan pendekatan ini dalam pernyataannya Bahwa tidak mengubah nilai-nilai dasar pesantren. Tapi kami mencari cara bagaimana nilai itu bisa dimasukkan dalam borang akreditasi, tanpa kehilangan makna.

Pernyataan ini mempertegas bahwa strategi sinkronisasi yang dijalankan bukan sekadar upaya teknis administratif, melainkan merupakan bagian dari rekayasa budaya institusional yang reflektif dan transformatif. Dalam konteks ini, pesantren tampil sebagai aktor institusional yang aktif dan kritis, bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pelaku yang mampu membentuk ulang relasi kuasa antara nilai-nilai lokal dan regulasi nasional dalam bingkai kebijakan publik yang lebih inklusif terhadap keberagaman epistemik.

Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Fanreza, (2021) yang menyoroti urgensi penerapan strategi adaptif berbasis budaya lokal sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi eksternal lembaga pendidikan, tanpa harus mengorbankan identitas esensial yang melekat di dalamnya. Dalam kerangka ini, pendekatan integratif yang dilakukan membuktikan bahwa nilai-nilai tradisional tidak harus diposisikan sebagai lawan dari modernitas institusional. Sebaliknya, apabila dikelola secara strategis dan reflektif, nilai-nilai tersebut justru dapat menjadi sumber daya kultural yang memperkaya praktik pendidikan dan memungkinkan pesantren untuk terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional tanpa kehilangan autentisitas jati dirinya.

4. KESIMPULAN

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan epistemologis dan struktural yang nyata antara nilai-nilai lokal pesantren seperti *khidmah*, *tawadhu'*, dan *ikhlas* dengan standar akreditasi nasional yang berbasis paradigma teknokratik dan manajerialistik. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi pada pergeseran orientasi nilai dalam praktik pendidikan. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa meskipun sistem formal berusaha menyeragamkan mutu pendidikan, tetap terdapat ruang penting untuk mempertahankan ekspresi nilai-nilai lokal yang bersifat spiritual dan afektif. Dengan mengacu pada teori sistem nilai Parsons dan teori isomorfisme regulatif dari DiMaggio & Powell, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendidikan bukan sekadar alat reproduksi kognitif, tetapi juga wahana pewarisan nilai dan spiritualitas. Pesantren yang mampu mengelola ketegangan ini secara adaptif bukan hanya mempertahankan identitas, tetapi juga menawarkan paradigma alternatif dalam memahami kualitas pendidikan secara lebih holistik.

Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kemampuannya memetakan konflik nilai secara tajam serta mengusulkan strategi sinkronisasi kelembagaan berbasis pendekatan kontekstual yang tidak menanggalkan akar budaya institusi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur pendidikan dengan memperkenalkan variabel baru berupa “rekayasa budaya akreditasi” dan mengusulkan kerangka kerja untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam instrumen evaluasi formal. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu studi kasus di Pondok Pesantren Nurul Jadid, sehingga generalisasi temuan ke konteks pesantren lain perlu

dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, aspek lain seperti perspektif gender, usia, maupun pendekatan kuantitatif yang lebih luas belum sepenuhnya dijangkau. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dan lintas-lokasi sangat dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, sekaligus menyediakan landasan yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan akreditasi yang inklusif terhadap keberagaman nilai-nilai lokal.

REFERENSI

- Arlina, U., Qomar, M., & Aziz, A. (2024). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Ptqi). *Skills: Jurnal Riset Dan Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 34–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/skills.v3i1.2935>
- Baharun, H., & Badriyah, F. N. (2020). Pendidikan Multikultural Dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif Kh. Said Aqil Siroj. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 37–51. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.240>
- Baidowi, A., & Salehudin, M. (2021). Strategi Dakwah di Era New Normal. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 2(01), 58–74. <https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.04>
- Bistiana, M., & Indrarini, R. (2021). Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 85–97. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>
- Fanreza, R. (2021). Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dosen Tetap Al-Islam Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(2), 114–130. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i2.1386>
- Fitri, R., & Ondeng, S. (2022). Pesantren di Indonesia: Lembaga pembentukan karakter. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 42–54.
- Hidayat, H. (2025). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(1), 15–21.
- Hidayat, M. N. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Desa Pandanwangi, Kab. Jombang. *Journal of Public Power*, 7(1), 12–22.
- Imanuddin, M., & Yunus, M. A. (2025). Peran Manajemen Pendidikan Berbasis Pesantren dalam Penguatan Karakter Santri di Pondok Pesantren Babussalam. *Al-Idarah, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 11–21.
- Khadijah, I. (2022). Implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Barat: Penelitian di MIS I'anatut Thalibin Bandung, MIS Miftahul Huda Bandung dan MIS Iqro Kabupaten Garut. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Khoiriyah, S. H. (2022). Pesantren Sebagai Model Lembaga Pendidikan Berbasis Karakter. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 6(1), 71–79.
- Kusumaningrum, A., Rozi, F., Baharun, H., Mutiatun, Y., & Mardiyah, N. (2022). Strengthening Children's Motor Intelligence through The Learning Management System. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4620–4630. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2484>
- Mahmud, M. E., Baharun, H., Asykur, M., & Rochmatin, Z. (2022). Increasing Teacher Professionalism Through Change Management in Madrasah: Kurt Lewin's Perspective. *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 5(1), 47–63. <https://doi.org/10.21093/sajie.v5i1.5330>
- Mediawati, B. T. E. (2023). Transformasi nilai-nilai Islam melalui pendidikan pesantren: Implementasi dalam pembentukan karakter santri. *Journal of International Multidisciplinary Research Vol*, 1(1).

<https://doi.org/10.62504/jimr403>

- Najiburrahman, N., Khoir, M. I., Hefniy, H., & Mudarris, B. (2024). Exploring Leadership Based on Local Wisdom: Leadership Learning in Pesantren. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 8(1), 43–56.
- Niswah, C., Sholihin, M., Zasvenda, M. Y., Amirullah, E., & Dani, A. (2025). Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(6), 308–316.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Setiawan, M. T. (2025). Benturan Paradigma: Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah antara Filosofi Merdeka Belajar dan Tekanan Akreditasi Nasional. *An-Nashru: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 170–184.
- Zamroni, Z., Baharun, H., Rohmawati, E. F., & Yani, K. O. (2022). Strengthening Madrasah Literacy Through Change Management Tyagi's Model. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 201–213. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v0i0.4291>